

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
INTISARI	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Keaslian Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tindak Pidana Korupsi.....	12
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	
2. Sejarah Peraturan Perundang-undangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	24
a. Delik Korupsi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum	25

Pidana.....	
b. Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat (Angkatan Darat dan Laut).....	26
c. Undang-Undang Nomor 24 (PRP) Tahun 1960 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	31
d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	33
e. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	34
f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	35 39
B. Kejaksaan Republik Indonesia.....	39
1. Sejarah Berdirinya Kejaksaan Republik Indonesia.....	41
2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan Republik Indonesia.....	45
3. Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia.....	46
C. Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah.....	
BAB III METODE PENELITIAN.....	52
A. Jenis Penelitian.....	52
B. Bahan Penelitian.....	53
C. Lokasi Dan Subjek Penelitian.....	55
D. Cara dan Alat Pengumpulan Data.....	56

E. Jalannya Penelitian.....	57
F. Metode Analisis.....	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
A. Penegakkan Hukum Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan Negeri Bantul Terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Program Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah Di Kabupaten Bantul.....	59
1. Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Program Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah Di Kabupaten Bantul.....	60
2. Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Program Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah Di Kabupaten Bantul.....	72
3. Penuntutan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Program Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah Di Kabupaten Bantul.....	84
B. Upaya Yang Ditempuh Oleh Kejaksaan Negeri Bantul Dalam Mencegah Terulangnya Tindak Pidana Korupsi Program Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah Di Kabupaten Bantul.....	90
1. Instrumen Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D)	90
2. Instrumen <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i>	

Perdata dan Tata Usaha Negara	94
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	102
INDEKS SUBJEK.....	105
INDEKS ISTILAH.....	106
GLOSARIUM.....	107